

Implemetasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang

Eko Eryanto Nugroho^{1*}, Abd. Mahsyar², Jaelan Usman³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine the implementation of health service policies in the handling of malnutrition in infants in Enrekang Regency. The study used qualitative research. The number of informants in this study was 5 people. Data collection were l observation, interviews with a number of informants were the head of the health department, the Public Health sector, nutrition program managers and parents. The technique of checking the validity of the data used triangulation, the method triangulation. The data analysis technique used interactive analysis. The results of this study showed that the implementation of policies carried out by the health department in handling malnutrition in children under five years old in Enrekang Regency was already good, it was seen that the communication aspect was already run well because there was pre-socialization, the resources were available so it was more easier, the disposition of the handling was carried out in the form of giving vitamins, and the bureaucratic structure of children and young women who worked together with the health center and the hospital, were also supporting and inhibiting factors as movers thinkers or planners to achieve an organizational goal and lack of vitamins and supplements.

Keywords: *policy implementation, malnutrition*

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam penanganan gizi buruk pada balita Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan adalah kepala dinas kesehatan, bidang KesMas, pengelolah program gizi dan orang tua. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian ini, implementasi kebijakan yang dilakukan dinas kesehatan dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Enrekang sudah baik, hal ini dilihat aspek komunikasisudah berjalan karena terlebih dahulu melakukan sosialisasi, sumber daya yang dimiliki sudah mencukupi sehingga mejudahkan, disposisi penanganan tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian vitamin, dan struktur birokrasi anak dan remaja putri yang berkerja sama dengan pihak puskesmas dan pihak rumah sakit, adsapun menjadi faktor pendukung dan penghambat sebagai penggerak pemikir dan ataupun perencana untuk mencapai suatu tujuan organisasi dan kurang pemberian vitamin dan suplemen.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, gizi buruk*

*ekoeryanton@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan publik hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat kita temukan kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan nasional dan bidang-bidang lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Adapun pengertian dari kebijakan publik (public policy) adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Kemudian pengertian lain Kebijakan Publik adalah “serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan”.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Selain itu Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Isu tentang gizi merupakan bagian penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tingkat keadaan gizi optimal akan tercapai apabila kebutuhan gizi itu terpenuhi, mulai dari pemberian asupan pada usia balita. Masalah gizi terjadi di setiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan (janin), bayi, anak, dewasa, dan usia lanjut. Periode dua tahun pertama kehidupan merupakan masa kritis, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Melihat tingginya angka gizi buruk di

Indonesia pemerintah membutuhkan alternatif kebijakan guna menanggulangi masalah tingginya angka gizi buruk. Salah satu langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah angka gizi buruk adalah dengan menerapkan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dalam upaya menuntaskan Gizi Buruk.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang melaksanakan program Perbaikan Gizi Masyarakat sehingga balita gizi buruk yang ada dapat diberikan penanganan agar status gizinya dapat meningkat menjadi lebih baik. Dilihat dari data yang ada menurut Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Kabupaten Enrekang memiliki kasus gizi buruk berdasarkan data balita dengan status gizi stunting di Kabupaten Enrekang mencapai 24,5 persen atau 3.771 jiwa dari total 15.405 balita yang ada di Kabupaten Enrekang. Kasus gizi buruk masih saja dialami oleh balita dan rasio setiap tahunnya memang masih tergolong tinggi karena setiap tahunnya pasti ada kejadian kasus gizi buruk yang terjadi pada balita di Kabupaten Enrekang khususnya di Kecamatan Buntu Batu, Baraka, Malua, Enrekang, dan Maiwa dengan perlunya penanganan khusus dan perhatian dari pemerintah daerah maupun instansi yang terkait guna menangani kasus

tersebut agar balita terbebas dari masalah gizi buruk sehingga harapannya Kecamatan tersebut dan daerah Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang terbebas dan bersih dari kasus gizi buruk pada balita.

Dengan ini melihat kasus gizi buruk yang ada di Kabupaten Enrekang yang cukup besar. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edward III yakni komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berkaitan dengan pertumbuhan anak dengan kesehatan yang mendasari lahirnya Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, di mana pada Bab II tugas dan tanggung jawab pada pasal 5 yang berbunyi Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab: menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi; melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi surveilans kewaspadaan gizi skala nasional; melakukan penanggulangan gizi buruk skala nasional; mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan gizi; mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam situasi darurat.

Berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan dapat dijadikan dasar awal penelitian untuk menganalisa lebih mendalam tentang Implementasi Kebijakan dinas kesehatan dalam penanganan gizi buruk. Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu unsur paling penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sikap dan perilaku para aparat pemerintah yang ada pada birokrasi.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano, sebagaimana dikutip Keban (2004), mengatakan administrasi publik adalah “proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam sebuah kebijakan publik”. Roosenbloom yang dikutip Pasolong (2010), mendefinisikan administrasi publik merupakan “pemanfaatan teori dan proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian”.

Ruang lingkup administrasi publik adalah hal-hal yang dibahas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam lingkup administrasi publik. Menurut Keban (2004) ruang lingkup suatu administrasi publik meliputi dimensi-dimensi strategis, yaitu dimensi kebijakan, dimensi organisasi, dimensi manajemen, dimensi moral dan etika, dimensi lingkungan, dimensi akuntabilitas kinerja. Peran administrasi publik dijelaskan oleh Gray, sebagaimana dikutip Pasolong (2010) yakni: Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional, dapat melindungi hak-hak masyarakat, dan berperan dalam melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat.

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

“Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”(Winarno, 2002).

Dikutip Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa : “implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan suatu fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadiankejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya dengan pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha yang harus diberikan untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian”. Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa imlementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan,aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan,dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis,dimana suatu pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,sehingga pada akhirnya

akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68)

Model-model Implementasi menurut Parsons (2006,) secara garis besar model implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi empat yakni model analisis kegagalan, model rasional (top-down), model bottom-up, model teori hybrid. Faktor Pendukung Implementasi menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Winarno (2002), yakni komunikasi, Sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambat implementasi menurut Sunggono (1994) implementasi kebijakan mempunyai

beberapa faktor penghambat, yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tidak dapat lepas dari Kebijakan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan nasional dan bidang-bidang lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Menurut Islamy (2001), menyimpulkan bahwa kebijakan publik (public policy) adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Menurut Dunn, sebagaimana dikutip Pasolong (2010), mengatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Menurut Thomas R Dye sebagaimana

dikutip Pasolong (2010), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Jenis-jenis kebijakan publik menurut Nugroho (2006) dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kebijakan yang bersifat makro, kebijakan yang bersifat meso, kebijakan yang bersifat mikro. Proses kebijakan publik menurut Subarsono (2005), adalah “serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan”.

Dinas Kesehatan ialah tingkat pelaksana tugas daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala dinas. Kepala dinas bertanggung jawab serta berkedudukan langsung pada Bupati kepada Sekretaris Daerah (Sekda).

Gizi buruk memiliki pengaruh dalam jangka waktu yang panjang, karena dapat mempengaruhi kualitas

SDM seseorang. Menurut PERSAGI (2009), Gizi buruk adalah kondisi kurang gizi dalam tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang waktu cukup lama.

Gizi buruk berasal dari bahasa arab *Al Gizzai* yang artinya makanan dan manfaat untuk kesehatan, sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Gizi memiliki peran penting untuk membina dan mempertahankan kesehatan seseorang yang diperlukan oleh balita dan anak. Pemenuhan gizi merupakan kewajiban setiap seseorang untuk memelihara kesehatan. Pada usia balita perkembangan dari kemampuan berbahasa, berkresi, kesadaran sosial emosional, dan intelegensi anak berjalan cepat dan merupakan landasan perkembangan bagi anak selanjutnya. Pemberian nutrisi pada masa puncak pertumbuhan otak harus dimanfaatkan sebaik- baiknya, salah satunya nutrient yang cukup, yang mengandung zat- zat gizi lengkap yang harus dapat dikonsumsi setiap harinya. Jika pada usia ini tidak dapat dikelola dengan baik dan pemenuhan gizinya buruk maka sulit untuk memperbaikinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, kemudian cara pengumpulan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Dengan tipe penelitian fenomenologi, untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu empiris yang diperoleh dari informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Bidang KesMas, Pengelolah Program Gizi dan Orang Tua Penderita Gizi Buruk. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan atau dokumen- dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait Implementasi Dinas Kesehatan dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Enrekang. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan dalam menganalisa data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga

triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Enrekang merupakan satu diantara 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan terletak ditengah-tengah bagian utara Jazirah Sulawesi Selatan yang diapit pada sebelah timur Gunung Latimojong dan sebelah barat terdapat bentangan Sungai Saddang. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak antara $3^{\circ}14'36''$ - $3^{\circ}50'0''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}40'53''$ - $120^{\circ}6'33''$ Bujur Timur. Jarak dari Ibu Kota Sulawesi Selatan ke Kabupaten Enrekang berjarak 235 Km. secara administrasi Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah yakni di Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja kemudian di Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu sedangkan di Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Sebelah Barat Kabupaten Pinrang.

Setelah setengah dasawarsa telah mengalami perubahan Administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan ataupun pada tingkat kelurahan atau desa yang pada awalnya th 1995 hanya mempunyai jumlah 5 Kecamatan dan 54 kelurahan atau

desadan pada th 2008 jumlah kecamatan telah berubah menjadi 12 dan 129 desa atau kelurahan. Secara umum, bentuk topografi wilayah Enrekang yang juga terkenal dengan sebutan "MASSENREMPULU" yang bermakna wilayah yang terletak dilemang pegunungan. Hal ini memang tepat sebab pada kenyataannya topografi Kabupaten Enrekang sekitar 85% merupakan medan yang bergelombang, berbukit sampai curam dan hanya sekitar 15% yang merupakan medan berombak sampai landai. Sedangkan ketinggian daerah dari permukaan laut bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut.

Dalam tugas Dinas Kesehatan ialah Memberdayakan masyarakat agar mandiri untuk hidup sehat dengan tujuan Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mau dan mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Mewujudkan lingkungan sehat. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkesinambungan dengan tujuan Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan ,

Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, mutu, pemeratan dan pemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan serta pengawasan bahan bahaya, Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dalam upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan Mengembangkan kebijakan, system pembiayaan dan manajemen kesehatan. Meningkatkan upaya mengendalikan penyakit dan masalah kesehatan dengan tujuan Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya, Meningkatkan surveilans dalam upaya system kewaspadaan dini KLB dan bencana meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, lanjut usia dan gizi masyarakat bertujuan Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga, Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan lanjut usia, Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat.

Komunikasi

Salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan

terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang menjalankan program penanganan gizi buruk pada balita yaitu terlebih dahulu melakukan penyuluhan tentang program penanganan gizi buruk yang dilakukan kepada masyarakat dan disampaikan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat.

Sumber Daya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi

implementasi kebijakan walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. “Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang terlebih dahulu akan mengetahui sebabaimana parahnya dan penyebab utama kekurangan gizi pada balita dilihat data yang mereka

ambil untuk masalah penanganan kekurangan gizi. Tidak hanya penangan kekurangan gizi saja akan tetapi berbagai macam penyakit mereka tangani yang berkoordinasi dengan pihak Puskesmas dan Rumah Sakit.

Adapun hasil wawancara kepada orang tua anak penderita kekurangan gizi yang mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang terlebih dahulu melakukan pendataan kepada penderita kekurangan gizi dan kemudian pemberian semacam sosialisasi kepada orang tua anak tentang kecukupan gizi pada ibu hamil, anak dan remaja putri.

Adapun salah satu penyebab yang menghambat Impementasi kebijakan penangan gizi buruk di Kabupaten Enrekang yaitu pola asuh, pola makan, dan sanitasi pola asuh yang didefenisikan bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan.

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa masih ada orang tua dari anak yang masih kurang memperhatikann bagaimana pemberian asupan gizi yang cukup sehingga menjadi penghambat dalam dalam penanangan kekurangan gizi yang ada di Kabupaten Enrekang.

Adapun penghambat lainnya dalam Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Enrekang adalah sanitasi, sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian tentang kebersihan contohnya air bersih dan masih menjaga kebersihan lingkungan.

Disposisi

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius, watak dan karakteristik atau sikap yang

dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam pencapaian tujuan dengan, implementasi kebijakan penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Enrekang dapat memberikan fokus perubahan sosial dan politik yang dirasakan oleh kelompok sasaran tersebut. Dengan demikian, penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Enrekang maka dilakukan wawancara.

Dari hasil wawancara diatas maka kita dapat simpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah melakukan penanganan kekurangan gizi pada balita yang dimana penanganan tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian vitamin atau suplemen penambah nafsu makan dan makanan yang bergizi contohnya seperti susu, biscuit dan makanan lainnya yang mampu memberikan perubahan pada anak tersebut.

Dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Enrekang

yang dapat memberikan fokus perubahan sosial dan politik yang dirasakan oleh kelompok sasaran tersebut. Dengan demikian, maka kita melakukan wawancara khusus pada informan yaitu orang tua anak yang terkena kekurangan gizi.

Dari hasil wawancara kepada orang tua anak penderita kekurangan gizi maka dapat dilihat penanganan kekurangan gizi yang di Kabupaten Enrekang sudah dilakukan secara baik, dan penanganan tersebut dengan melakukan pemberian suplemen penambah nafsu dan vitamin seperti susu, biskuit dan lainnya. Tidak hanya sebatas pemberian suplemen dan vitamin saja tetapi anak tersebut tetap dalam pengawasan apakah ada perubahan atau tidak.

Salah satu yang dapat membuat implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai yang diinginkan yaitu adanya faktor pendukung dalam menjalankan sebuah implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia (SDM) salah satu yang sangat penting dan bisa dikatakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah namanya organisasi baik, institusi maupun dari perusahaan. SDM juga dapat di artikan sebagai kunci yang bisa menentukan suatu perkembangan perusahaan. Pada umumnya, SDM yang di lakukan suatu yang dipekerjakan

disebuah organisasi sebagai, penggerak pemikir danataupun perencana untuk mencapai suatu tujuan organisasi itu.

Untuk pendukung Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang, maka untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat atau orang tua penderita kekurangan maka dilakukan wawancara.

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita Kabupaten Enrekang Salah satu diantaranya faktor yang sangat penting dan bisa dikatakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah namanya organisasi baik, institusi maupun dari perusahaan. SDM juga dapat di artikan sebagai kunci yang bisa menentukan suatu perkembangan perusahaan pada umumnya suatu yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak pemikir danataupun perencana untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Faktor pendukung lainnya adalah faktor yang mendukung implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang adalah orang tua anak penderita kekurangan gizi. Untuk dukungan Implementasi Kebijakan

Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang, maka untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat atau orang tua tentang penanganan kekurangan gizi pada balita maka dilakukan wawancara.

Dari hasil wawancara diatas maka kita dapat simpulkan masyarakat atau orang tua penderita gizi buruk sangat bersnyukur dalam hal pemberian penanganan kekurangan gizi yang ada di Kabupaten Enrekang sudah bisa dikatakan sudah menjalankan tugas dan fungsinya.

Struktur Birokrasi

Birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP.

Implementasi seperti hubungan inter-organisasi, sebagai teori kontingensi; sebagai analisis kasus; sebagai bagan subsistem kebijakan; dan sebagai manajemen sektor public. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang menfokuskan kepada pencapaian tujuan dengan menganalisa

kasus kekurangan gizi pada balita di Kabupaten Enrekang.

Melihat hasil wawancara kepada informan yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang maka kita dapat simpulkan bahwa pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan penangan gizi buruk pada balita dengan melihat apa saja penyebab utama terjadinya kekurangan gizi yaitu pada pola makan, sanitasi, dan pola asuh kemudian memberikan sosialisasi terkait asupan gizi untuk ibu hamil, anak dan remaja putri yang berkerja sama dengan pihak puskesmas dan pihak rumah sakit.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang maka dapat disimpulkan Komunikasi adalah program penangan gizi buruk pada balita yaitu terlebih dahulu melakukan penyuluhan tentang proram penangan gizi buruk yang dilakukan kepada masyarakat dan disampaikan melalui kegiatan- kegiatan masyarakat.

Sumber daya yaitu pencapaian tujuan yang terlebih dahulu akan mengetahui sebabaimana parahnya dan penyebab utama kekurangan gizi pada

balita dilihat data yang mereka ambil untuk masalah penanganan kekurangan gizi. Tidak hanya penanganan kekurangan gizi saja akan tetapi berbagai macam penyakit mereka tangani yang berkoordinasi dengan pihak Puskesmas dan Rumah Sakit sudah cukup baik dalam penanganannya.

Disposisi yaitu penanganan kekurangan gizi pada balita yang dimana penanganan tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian vitamin atau suplemen penambah nafsu makan dan makanan yang bergizi contohnya seperti susu, biscuit dan makanan lainnya yang mampu memberikan perubahan pada anak tersebut.

Struktur birokrasi yaitu penanganan gizi buruk pada balita dengan melihat apa saja penyebab utama terjadinya kekurangan gizi yaitu pada pola makan, sanitasi, dan pola asuh kemudian memberikan sosialisasi terkait asupan gizi untuk ibu hamil, anak dan remaja putri yang berkerja sama dengan pihak puskesmas dan pihak rumah sakit.

Faktor pendukung yaitu SDM juga dapat di artikan sebagai kunci yang bisa menentukan suatu perkembangan perusahaan pada umumnya suatu yang dikerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak pemikir dan ataupun

perencana untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Faktor penghambat yaitu pola asuh anak dan sanitasi yang tidak lepas dari kurangnya pemberian vitamin, suplemen nafsu makan dan kurangnya kebersihan lingkungan contohnya air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna. 2010. Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kota Gorontalo. *Jurnal administrasi public*. Vol. 01 No. 01
- Albar, muh azis.,2019. Besarnya stunting gizi buruk di Enrekang. *TribunEnrekang*.Enrekang 29 januari 2019. <https://makassar.tribunnews.com/2019/01/14/ini-penyebab-besarnya-stunting-di-enrekang>. diakses pada tanggal 23 mei 2019.
- Awaloedin, 2016, *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Hadi, Minto. 2017. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jaminan Kesehatan Daerah dan Surat Pernyataan Miskin). *Jurnal administrasi public*. Vol. 01 No. 06
- Intan Sri Wardani, Peran dinas kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes, skripsi diterbitkan, Brebes: Ilmu

- pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Islamy, Irfan. M. (2001) Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara.
- Mustopadidjaja, 2016, Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Mahsyar, A. 2018. Implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan di kabupaten nunukan. Jurnal administrasi publik. Vol. 4 No. 2
- Noor, Irwan, 2013, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Jurnal administrasi publik, Vol. 02 No. 14
- Ruru. M Joorie. 2017. Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun RPJMP Kota Tomohon. Jurnal administrasi public, Vol. 04 No. 048.
- Safitri, Ifana. (2015). promotif, prevantif, kuratif, rehabilitatif dalam kesehatan. <http://ifanascout.blogspot.co.id/2015/02/upaya-promotif-preventifkuratif-dan.html> di unduh pada 03 Agustus 2019 pukul 15.40 WIB.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2013, Pelaksanaan Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk (Restu Ibu) Di Kabupaten Ngawi, Jurnal administrasi public, Vol. 02 No. 03.
- Tieka Kusuma Wardhani, Metode penanganan masalah gizi buruk sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, skripsi diterbitkan, Yogyakarta: Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Ulumiyah. Ita. 2013. Peran pemereintah desan dalam memberdayakan masyarakat desa. Jurnal administrasi public, Vol. 1. No. 5.
- Peraturan menteri kesehatan RI. (2014). Upaya perbaikan gizi. Jakarta: Permenkes RI.
- Peraturan menteri kesehatan RI. (2016). Pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Jakarta: Permenkes RI